

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nagita Shellina Irine
nagitashellina@yahoo.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the influence of human resources competency, the implementation of government accounting standard, and the government internal control system to the quality of financial statement of local government at Local Apparatus Work Unit (SKPD) in Surabaya. The data is the primary data. The data has been collected by issuing the questionnaires to the respondents. The population is all employees at 16 departments of Local Apparatus Work Unit (SKPD) Surabaya city and 62 employees at 16 departments of SKPD Surabaya city have been selected as samples. The samples have been selected by using purposive sampling technique. The criterion is: all civil servants i.e. all accounting or financial staffs. The data analysis has been done multiple linear regressions. The result of this research shows that the human resources competency, the implementation of government accounting standard and the government internal control system have positive influence to the quality of financial statement of local government.

Keywords: *the quality of financial statement, human resources competency, the implementation of SAP, the government internal control system.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 16 Dinas SKPD Kota Surabaya dan yang menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 62 pegawai di 16 SKPD Kota Surabaya. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria: Pegawai Negeri Sipil yaitu staff bagian akuntansi/keuangan. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik identik dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah dan bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik guna memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas berdampak terhadap kualitas laporan keuangan, apabila akuntabilitas tercapai dengan baik maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010) tentang kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Upaya pemerintah untuk membuat pelaporan yang akuntabel dari masing-masing instansi sebenarnya telah melalui proses audit yang dilakukan oleh lembaga BPK. Dari hasil audit BPK dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing instansi belum sempurna. Terbukti pada tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2010-2014

Tahun	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2010	12	13 %	67	72 %	3	3 %	11	12 %	91
2011	21	23 %	62	67 %	2	2 %	7	8 %	92
2012	31	34 %	52	58 %	0	0 %	7	8 %	90
2013	35	38 %	55	59 %	0	0 %	3	3 %	93
2014	56	62 %	33	38 %	0	0 %	0	0 %	91

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2015

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2013 opini WTP masih dibawah 50%, hanya saja pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 56%. Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2010 sampai 2013 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Sehingga opini WTP dari tahun ke tahun masih sedikit, sisanya adalah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dari audit BPK tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan hal yang masih perlu dibenahi agar dapat tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

Melihat masih belum maksimalnya laporan keuangan, maka perlu dilakukan upaya untuk mengetahui faktor apa yang dapat menyebabkan belum maksimalnya laporan keuangan tersebut. Faktor pertama yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, menurut Marwansyah (2009:34) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Persoalannya adalah kompetensi SDM yang ada di dalam organisasi, tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan sebuah pekerjaan. Dalam kenyataannya, organisasi yang cukup beruntung karena mengelola SDM yang kompeten, dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap mental dan sosial yang sangat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tetapi banyak pula organisasi yang berada dalam kondisi sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Kemudian faktor kedua, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hal yang penting disebabkan standar akuntansi pemerintahan telah ditentukan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Dimana berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Faktor terakhir yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektasian penggelapan (*fraud*). Laporan keuangan yang disajikan harus berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Terdapat isu tentang sistem pengendalian intern yang mendapat perhatian cukup besar belakangan ini, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan dalam IHPS 1 Tahun 2015 menemukan 1009 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang meliputi Kelemahan struktur pengendalian intern, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 2:

Tabel 2
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan struktur pengendalian intern	246
2	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	368
3	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	395
Jumlah		1009

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2015

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana apabila kualitas laporan keuangan telah terpenuhi maka pemerintahan yang baik akan dapat tercapai. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya karena pemerintah kota surabaya ditetapkan sebagai kota pertama yang menjadi pilot project penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumusan masalah yang diajukan penulis adalah (1) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? (2) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? (3) Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? dan Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh faktor Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (3) Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pemerintahan demokrasi memiliki hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2004) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) Pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), yaitu akuntabilitas ini merujuk pada kemampuan pihak yang berkedudukan dalam posisi non-kepemimpinan untuk menuntut akuntabilitas pada pemimpin. Artinya, status agen lebih tinggi dari principal. (2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal), yaitu hubungan akuntabilitas antara agen dan principal dimana keduanya berkedudukan sejajar, atau dapat dikatakan sebagai fungsi dari *check and balance* yang berada dalam pemerintahan.

Pemerintah Daerah

Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan bermakna bahwa pemerintah daerah dan DPRD sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Operasional, (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan tersebut meliputi: Pemerintah; Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2009:36) Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, karakteristik kepribadian, dan sikap yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas-tugas dan peran-peran dalam pekerjaannya. Karakteristik kompetensi menurut

Hutapea dan Thoha (dalam Andini, 2015) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu: (1) Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu); (2) Keterampilan (*Skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal; (3) Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2011:271), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan di lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

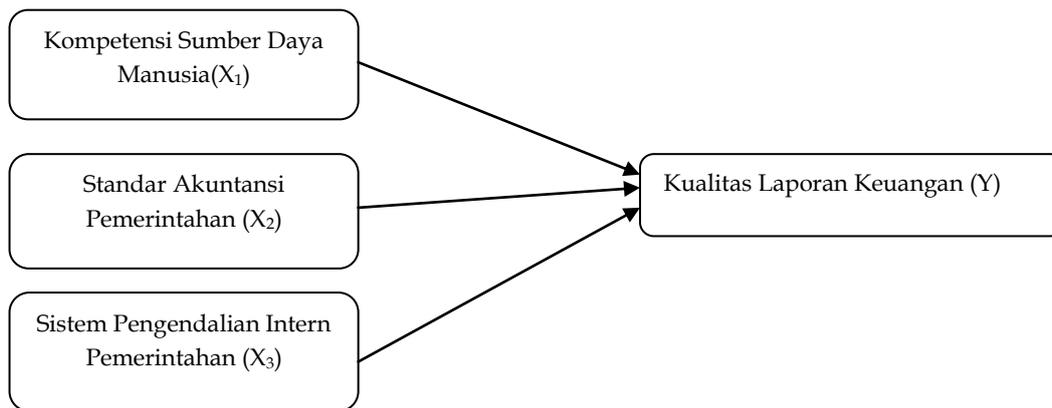
Manfaat dari Standar Akuntansi Pemerintahan: (1) Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Sitem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 wajib dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ wali kota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011:251).

Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya: (1) Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (2) Keandalan pelaporan keuangan; (3) Pengamanan aset negara; (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Marwansyah (2009:36) kompetensi menjadi acuan dan dasar bagi sebuah organisasi dalam mengelola human capital dan untuk mencapai tujuan-tujuannya, sebuah organisasi harus memiliki individu-individu dengan kompetensi unggul. Human capital adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al* (2014) yang menyatakan bahwa Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Pengembangan SAP menurut Nordiawan (2006:68) mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku maupun kondisi sumber daya manusia. Penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al* (2014) menyatakan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

H₂: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Pada nyatanya masih ditemukan penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberi opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (BPK 2011, dalam Nurillah, 2014).

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang menunjukkan arah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sangadji dan Sopiah, 2010:22). Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 16 Dinas SKPD Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, ditetapkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Surabaya; (b) Pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada SKPD di Kota Surabaya.

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa kuesioner dibagikan pada 16 SKPD Kota Surabaya sebanyak 62 responden. Berikut rincian pembagian kuesioner pada setiap SKPD:

Tabel 3
Daftar Sampel Penelitian

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah kuesioner
1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2
2	Dinas Kebakaran	2
3	Dinas Kebersihan	4
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	3
9	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	7
10	Dinas Pendidikan	2
11	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	2
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3
14	Dinas Perhubungan	3
15	Dinas Sosial	6
16	Dinas Tenaga Kerja	3

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan bantuan kuesioner. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada pegawai bidang akuntansi yang berada di 16 SKPD Kota Surabaya untuk menjawabnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015) yaitu: (1) Pengetahuan (*Knowledge*), (2) Keahlian (*Skill*), (3) Perilaku (*Attitude*).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Evicahyani (2015) yaitu: (1) Akuntabilitas, (2) Manajemen, (3) Transparansi, (4) Keseimbangan antar generasi, (5) Evaluasi kinerja.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_3)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015) yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan.

Variabel Dependen

Kualitas laporan keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Sudiarianti (2015) yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan lain-lain (Ghozali, 2006:19).

Uji Kualitas Data

Uji validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2008:135). Sedangkan Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2008:75).

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2008:75).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2008:78).

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2008:79).

Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi, yaitu :

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PSAP + \beta_3 SPIP + \varepsilon$$

Keterangan: KLK = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, α = Konstanta, β = Koefisien Regresi, KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia, PSAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, SPIP = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ε = Nilai Standar error.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguji kesesuaian model (*goodness of fit*). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak (Suliyanto, 2011:55).

Analisis koefisien Determinasi Secara Simultan (Uji R²)

Koefisien Determinasi Berganda (R²) memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji t

Uji statistik t_{hitung} digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel tergantung. Sehingga apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung atau tidak (Suliyanto, 2011:55).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, secara geografis kota Surabaya berada pada 07°09'00" - 07°21'00" Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Surabaya meliputi daratan dengan luas 333,063 km² dan lautan seluas 190,39 km² serta jumlah penduduknya mencapai 2.909.257 jiwa. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur.

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 14.

Tabel 4
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan	62	2,73	5,00	4,0762	,47743
Kompetensi Sumber Daya Manusia	62	3,08	5,00	4,1030	,46529
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	62	3,00	5,00	4,2548	,47793
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	62	3,00	5,00	4,0518	,41773
Valid N (listwise)	62				

Sumber : Data primer diolah, 2016

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dengan jumlah sampel (N) sebesar 62 mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,0762 dengan minimal 2,73 dan maksimal 5,00, sedangkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,1030, variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,2548, dan variabel sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,0518. Sehingga nilai rata-rata proksi kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan variabel sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Uji Validitas variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Hasil pengujian validitas variabel kompetensi sumber daya manusia disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keputusan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	P1	0,341	0,254	Valid
	P2	0,689	0,254	Valid
	P3	0,684	0,254	Valid
	P4	0,669	0,254	Valid
	P5	0,752	0,254	Valid
	P6	0,868	0,254	Valid
	P7	0,850	0,254	Valid
	P8	0,872	0,254	Valid
	P9	0,893	0,254	Valid
	P10	0,898	0,254	Valid
	P11	0,704	0,254	Valid
	P12	0,461	0,254	Valid
	P13	0,543	0,254	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil pengujian validitas variabel standar akuntansi pemerintahan disajikan pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keputusan
Standar Akuntansi Pemerintahan	P1	0,656	0,254	Valid
	P2	0,741	0,254	Valid
	P3	0,762	0,254	Valid
	P4	0,772	0,254	Valid
	P5	0,791	0,254	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil pengujian validitas variabel sistem pengendalian intern pemerintah disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keputusan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	P1	0,511	0,254	Valid
	P2	0,701	0,254	Valid
	P3	0,668	0,254	Valid
	P4	0,655	0,254	Valid
	P5	0,440	0,254	Valid
	P6	0,534	0,254	Valid
	P7	0,537	0,254	Valid
	P8	0,490	0,254	Valid
	P9	0,750	0,254	Valid
	P10	0,776	0,254	Valid
	P11	0,584	0,254	Valid
	P12	0,511	0,254	Valid
	P13	0,784	0,254	Valid
	P14	0,710	0,254	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian validitas variabel kualitas laporan keuangan disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	R tabel	Keputusan
Kualitas Laporan Keuangan	P1	0,486	0,254	Valid
	P2	0,741	0,254	Valid
	P3	0,711	0,254	Valid
	P4	0,678	0,254	Valid
	P5	0,642	0,254	Valid
	P6	0,602	0,254	Valid
	P7	0,762	0,254	Valid
	P8	0,550	0,254	Valid
	P9	0,760	0,254	Valid
	P10	0,717	0,254	Valid
	P11	0,695	0,254	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2016

Dapat dilihat dari tabel 5, 6, 7, 8 menunjukkan bahwa bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($df=60$; $\alpha=0,05$), sehingga semua indikator pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern pemerintah di atas 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern pemerintah dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Hasil pengujian reabilitas disajikan pada tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel Penelitian	<i>CronbachAlpha</i>	Keterangan
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,921	Reliabel
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,799	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,879	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan	0,865	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2016

Pada tabel 9 menunjukkan nilai *CronbachAlpha* > 0,60 untuk masing-masing variabel sudah reliabel, sehingga dapat dikatakan alat ukur yang digunakan handal atau reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *software SPSS* yang disajikan pada tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

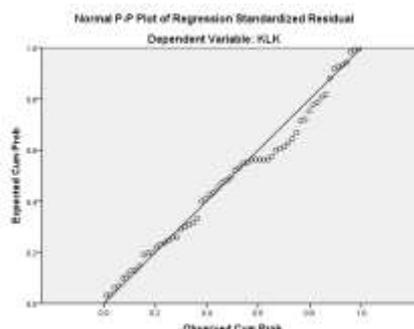
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi SDM	.507	1.974
Penerapan SAP	.494	2.025
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.396	2.524

Sumber : Data primer diolah, 2016

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai VIF lebih dari 1 dan kurang dari 10, serta Nilai tolerance kurang dari 1. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas (tidak terjadi korelasi diantara variabel independen).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas yaitu dengan melihat *normal probability plot*.

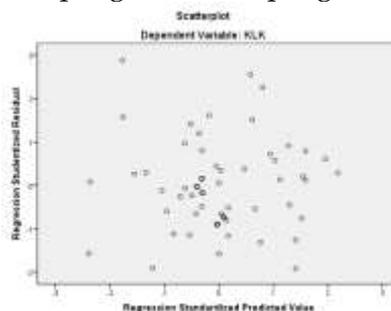


Gambar 2
Hasil Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output SPSS

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (KSDM), penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari SPSS yang disajikan pada tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.082	.383		.213	.832
	SDM	.450	.110	.439	4.083	.000
	SAP	.282	.130	.247	2.169	.034
	SPIP	.236	.116	.229	2.031	.047

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 11 diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 0,082 + 0,450KSDM + 0,282PSAP + 0,236SPIP$$

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguji kesesuaian model (*goodness of fit*). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Dapat dilihat pada tabel 12 adalah hasil Uji F.

Tabel 12
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.184	3	3.061	37.613	.000 ^a
	Residual	4.720	58	.081		
	Total	13.904	61			

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 37,613 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dilihat pada tabel 13 adalah hasil koefisien determinasi.

Tabel 13
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.813 ^a	.660	.643	.28528	1.929

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,660 yang berarti bahwa 66% variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah. Sisanya yaitu sebesar 34% dapat dijelaskan variabel lain diluar model.

Uji t

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui nilai B undestandard sebesar 0,450 dengan signifikansi sebesar 0,000 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis pertama berhasil menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui nilai B undestandard sebesar 0,282 dengan signifikansi sebesar 0,034 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis kedua berhasil menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui nilai B undestandard sebesar 0,236 dengan signifikansi sebesar 0,047 (berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis ketiga berhasil menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

PEMBAHASAN

Sumber daya manusia merupakan *human capital* dalam sebuah organisasi. *Human capital* adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. *Human capital* sebagai sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* lebih tinggi memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam dalam Nurillah, 2014). Dengan adanya *human capital* dalam sebuah oraganisasi dapat mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas adalah sumber daya manusia. Keberhasilan organisasi bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki, melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi menurut Marwansyah (2009) adalah pengetahuan, ketrampilan, karakteristik kepribadian dan sikap yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas-tugas dan peran-peran dalam pekerjaannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Roviyantie (2012), Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang bagus maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Tugas yang dibebankan kepada sumber daya manusia tersebut dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. Waktu pembuatan laporan keuangan dapat dihemat, sehingga laporan keuangan disajikan tepat pada waktunya serta mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (dalam Ihsanti 2014) bahwa dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin kompeten sumber daya manusia pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan SKPD. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas dapat diterapkan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No.71 Tahun 2010). Menurut Mahmudi (2011:271) standar akuntansi pemerintahan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan

keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berpengaruhnya standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Nordiawan (dalam Pratiwi *et al*, 2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian wati *et al*. (2014) bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan maka transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur, lengkap dan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan sertadapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar. Standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan dengan baik dalam suatu entitas maka akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektasian penggelapan (*fraud*).

Menurut Warren *et al* 2005 (dalam Herawati, 2014) Sistem pengendalian internal salah satunya untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan kekeliruan. Hal ini sejalan dengan penelitian Novalia (2015), Suatu sistem yang berkualitas dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada pegawai yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena hal tersebut yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi yang dilaporkan akan lebih akurat sehingga meminimalisir adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya pengendalian internal maka laporan keuangan yang dihasilkan lebih terintegritas, tepat, dan sesuai prosedur. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan dapat disusun sesuai prosedur yang telah ditetapkan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil kuesioner yang dibagikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa,

semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,660 atau 66%, sehingga sisanya yaitu sebesar 34% dapat dijelaskan variabel lain diluar model, seperti sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan pemanfaatan teknologi informasi, (2) Jumlah sampel untuk peneliti selanjutnya dapat ditambahkan lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan kualitas laporan keuangan menjadi kuat, (3) Menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat meyakini jawaban yang diberikan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1(24): 65-82.
- Evicahyani, S.I. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *Tesis*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Darise, N. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan Pertama. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi analisis multivariante dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2008. *Aplikasi analisis multivariante dengan program SPSS*. Edisi II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herawati, T. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR- Study & Accounting Research* XI(1).Bandung.
- Ihsanti, E. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Bukittinggi.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI). Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marwansyah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
- Novalia, I. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas SKPD Kota Surakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Solo.
- Nurillah, A. S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting* 3(2):1-13.

- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pratiwi, Y. R., Nurhayati, dan Nunung. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *SPeSIA*. Bandung.
- Roviyantie, D. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Siliwangi. Bandung.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudiarianti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Sangadji, M. E. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Wati, K.D., N.T. Herawati, dan N.K. Sirnawati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal* 2(1).